

Penangkapan ikan – Manajemen operasional penangkapan ikan pada kapal perikanan





© BSN 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Prakata	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Persyaratan awak kapal di kapal perikanan	2
4 Kompetensi awak kapal penangkap ikan	3
Lampiran (informatif) Mekanisme Penggunaan TKA di kapal perikanan bendera Indonesia ..	5
Bibliografi	7



Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) penangkapan ikan - manajemen operasional penangkapan ikan pada kapal perikanan disusun dengan maksud untuk:

1. Menyeragamkan penamaan atau penyebutan istilah dan definisi dalam manajemen operasional penangkapan ikan.
2. Bahan acuan/pedoman penangkapan ikan terkait manajemen operasional penangkapan ikan.

Standar ini dirumuskan oleh Sub Komite Teknis 65-05-S1 Perikanan Tangkap, yang telah dibahas melalui rapat teknis dan terakhir disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 03-05 Desember 2014 di Semarang

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat dan perpanjangan jajak pendapat pada tanggal 2 Maret 2015 hingga 1 Juni 2015 dengan hasil akhir RASNI.



Pendahuluan

Industri perikanan skala global mempunyai nilai mencapai US\$ 85 M per tahun, namun di dunia sebagian besar kegiatan kapal ikan mengarah kepada perbudakan dan perdagangan nelayan (*abused employees* dan *human trafficking*) karena mereka dipekerjakan layaknya binatang dengan jam kerja 18 jam per hari, namun hanya dibayar senilai 6 jam per hari. Dari hasil penelitian, bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, nelayan harus terlebih dahulu membayar kepada agen dan paspor nelayan ditahan oleh pemilik kapal/operator/agen setelah menandatangani kontrak kerja (Perjanjian Kerja Laut/PKL), sehingga pada saat bekerja di kapal ikan, nelayan hanya mengandalkan belas kasihan nakhoda, untuk menghindari kerja paksa (berupa perlakuan tidak manusiawi, kekerasan fisik, jam makan tidak teratur, penyalahgunaan seksual dan penundaan pembayaran gaji).

Migrant worker di kapal ikan yang berasal dari Philipina, Mesir, Ghana, Indonesia dan bekerja di perairan seluruh dunia, tidak memperoleh perlindungan kerja yang layak dari negaranya dan atau bendera kapal. Kondisi tersebut diperparah apabila operator kapal ikan di suatu negara menggunakan kapal sewa dengan bendera negara lain.

Beberapa upaya serikat nelayan di dunia memperjuangkan perlindungan nelayan seperti:

- 1) Papua New Guinea berhasil menegosiasi keseragaman gaji nelayan lokal yang bekerja di kapal bendera asing yang beroperasi di Papua New Guinea
- 2) Pemerintah New Zealand memberikan perlindungan hukum kepada nelayan migran yang bekerja bagi operator New Zealand dengan kapal sewa bendera lain untuk menghindari kerja paksa dan perbudakan
- 3) Nelayan migran yang bekerja di kapal bendera Inggris tidak tercatat dan tidak memperoleh perlindungan hukum karena tidak jelas status visanya (menggunakan visa transit) dan pemerintah Inggris sedang memperjuangkan mekanisme agar tercatat dengan baik.

Konvensi ILO MLC tahun 2006 yang efektif berlaku pada agustus 2013 belum mencakup perlindungan nelayan di kapal ikan. ILO menginisiasi konvensi No. 188 tahun 2007 dan rekomendasinya No. 199 tahun 2007 khusus untuk pekerjaan penangkapan ikan. Sampai tahun 2014, Konvensi ILO No. 188 baru diratifikasi oleh 7 negara dan berlaku efektif jika telah diratifikasi oleh 10 negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyediakan nelayan migran terbesar di dunia perlu mengadopsi prinsip-prinsip C188 untuk perlindungan TKI yang bekerja di kapal ikan.

Secara garis besar aturan ILO C188 tersebut memuat : 1) tanggung jawab pemilik kapal/operator/nakhoda; 2) gaji; 3) jam istirahat; 4) keterampilan nelayan; 5) penandatanganan PKL; 6) cakupan jaminan sosial dan kesehatan; 7) fasilitas dan makanan yang memadai; dan 8) repatriasi pada saat akhir PKL.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menganggap perlu memberi pembekalan kepada nelayan (umumnya berpendidikan rendah) yang akan melakukan ikatan hubungan kerja di kapal ikan, dalam rangka jaminan kepastian perlindungan hukum.

Penangkapan ikan – Manajemen operasional penangkapan ikan pada kapal perikanan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan sistem manajemen operasional penangkapan ikan pada kapal perikanan

2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dalam dokumen ini, istilah dan definisi berikut digunakan

2.1

pemilik kapal

perorangan atau perusahaan (berbadan hukum) yang memiliki kapal perikanan kapal perikanan, termasuk operator yang menyewa kapal dan kuasa pemilik kapal, yang melakukan usaha perikanan tangkap dan bertanggung jawab terhadap operasional kapal

2.2

kuasa pemilik kapal

pihak yang ditunjuk untuk mewakili dan bertindak atas nama pemilik kapal

2.3

operator kapal

setiap orang yang berdasarkan atas hak-hak tertentu yang diberikan oleh pemilik kapal untuk mengoperasikan kapal. pemilik tanggung jawab operasional kapal

2.4

nelayan

nelayan (fisher) adalah setiap orang yang diperkerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun, termasuk yang bekerja dan dibayar dengan gaji tetap dan atau berdasarkan bagi hasil di kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan

2.5

perjanjian kerja laut (pkl) di kapal perikanan

perjanjian kerja yang memuat jaminan kelayakan kerja dan kepastian hukum pekerja di atas kapal perikanan yang mengacu peraturan-peraturan yang berlaku.

2.6

kompetensi layak laut

suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh nelayan dalam menjamin keselamatan pelayaran.

2.7

kompetensi layak tangkap

suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh nelayan mampu mengoperasikan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan

2.8**kompetensi ahli penangkapan ikan**

merupakan kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan ikan, perencanaan operasi penangkapan ikan serta melaporkan kegiatan penangkapan melalui instrumen-instrumen pelaporan

2.9**kompetensi ahli alat penangkapan ikan**

merupakan kompetensi dalam mengoperasikan alat penangkapan ikan secara efektif, efisien, produktif dan ramah lingkungan

2.10**kompetensi layak simpan**

suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh nelayan untuk dapat melakukan penanganan, pengolahan, penyimpanan dan refrigerasi ikan sesuai dengan kaidah jaminan mutu dan keamanan pangan

2.11**kompetensi ahli penanganan ikan**

merupakan kompetensi dalam melakukan penanganan, pengolahan dan penyimpanan ikan sesuai dengan kaidah jaminan mutu dan keamanan pangan

2.12**kompetensi ahli refrigerasi perikanan**

merupakan kompetensi dalam mengoperasikan dan merawat mesin pendingin atau pembeku di kapal penangkap ikan

3 Persyaratan awak kapal di kapal perikanan

Persyaratan bagi awak kapal untuk bekerja di kapal perikanan berdasarkan tempat kerja:

3.1 Awak kapal yang bekerja di kapal perikanan berbendera Indonesia berpangkalan di dalam negeri

- 1) PKL di kapal perikanan
- 2) Surat Keterangan Kesehatan
- 3) Asuransi
- 4) Rekening tabungan atas nama awak kapal
- 5) Sertifikat keselamatan dasar (minimal BST)
- 6) Buku Pelaut
- 7) Sertifikat kompetensi layak tangkap dan layak simpan

3.2 Awak kapal yang bekerja di kapal perikanan berbendera Indonesia yang berpangkalan di negara lain

- 1) Sesuai dengan 3.1
- 2) Paspor
- 3) Visa Kerja / Visa Transit / Visa Pelaut / *Letter of Guarantee* *)

Catatan *): untuk tujuan Negara yang belum memiliki perjanjian bebas visa Catatan : disesuaikan dengan persyaratan Negara tujuan (UU Perikanan No. 45 Th 2009 & UU Pelayaran No. 17 Th 2008)

3.3 Awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri

- 1) Perjanjian Kerja Laut (PKL) di kapal perikanan
- 2) Paspor
- 3) Buku Pelaut

- 4) Visa Kerja / Visa Transit / Visa Pelaut / *Letter of Guarantee**)
- 5) Surat Keterangan Kesehatan
- 6) Asuransi
- 7) Rekening tabungan atas nama awak kapal
- 8) Sertifikat Keselamatan dasar (minimal BST)
- 9) Referensi yang menjelaskan kompetensi dan pengalaman kerja dari nelayan berupa Surat Keterangan Catatan Nelayan yang diterbitkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap
- 10) Sertifikat kompetensi yang mengacu pada SKKNI

Catatan *): untuk tujuan Negara yang belum memiliki perjanjian bebas visa

Catatan : disesuaikan dengan persyaratan Negara tujuan

4 Kompetensi awak kapal penangkap ikan

Kompetensi awak kapal yang harus dimiliki untuk jabatan di kapal penangkap ikan dikelompokkan menjadi:

4.1 Kompetensi layak laut

Sertifikasi kompetensi layak laut diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan,

Kompetensi layak laut meliputi:

- a) Keahlian nautika kapal penangkap ikan. Level berdasarkan daerah penangkapan ikan
- b) Keahlian teknik kapal penangkap ikan. Level berdasarkan daya mesin induk kapal
- c) Dasar-dasar keselamatan (BST)

4.2 Kompetensi layak tangkap

Sertifikasi kompetensi layak tangkap diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kompetensi layak tangkap meliputi:

4.2.1 Kompetensi ahli penangkapan ikan

Level keahlian penangkapan ikan didasarkan pada wilayah operasi yaitu:

- a) Perairan teritorial sampai dengan 12 Mil
- b) Perairan ZEEI dan laut lepas.

4.2.2 Kompetensi ahli alat penangkapan ikan

Level keahlian alat penangkapan ikan didasarkan pada tingkat resiko wilayah operasi alat penangkapan yaitu:

- a) Perairan pantai
- b) Perairan teritorial
- c) Perairan ZEEI dan laut lepas

4.3 Kompetensi Layak simpan

Sertifikasi kompetensi layak simpan diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kompetensi layak simpan meliputi:

4.3.1 Ahli penanganan ikan

Level keahlian penanganan ikan didasarkan pada lama operasi kapal ikan, jenis ikan hasil tangkapan, teknik penanganan ikan, metode dan lama waktu penyimpanan ikan, yaitu:

- a) kapal ikan beroperasi kurang dari 1 minggu yang menangkap ikan pelagis kecil dan metode penyimpanan ikan menggunakan es;
- b) kapal ikan beroperasi tidak lebih dari 15 hari dengan produk ikan segar serta metode penyimpanan ikan menggunakan air dingin atau es; dan

- c) kapal ikan beroperasi lebih dari 15 hari dengan produk pengolahan ikan beku serta metode penyimpanan ikan menggunakan ABF/IQF dan sarana cold storage.

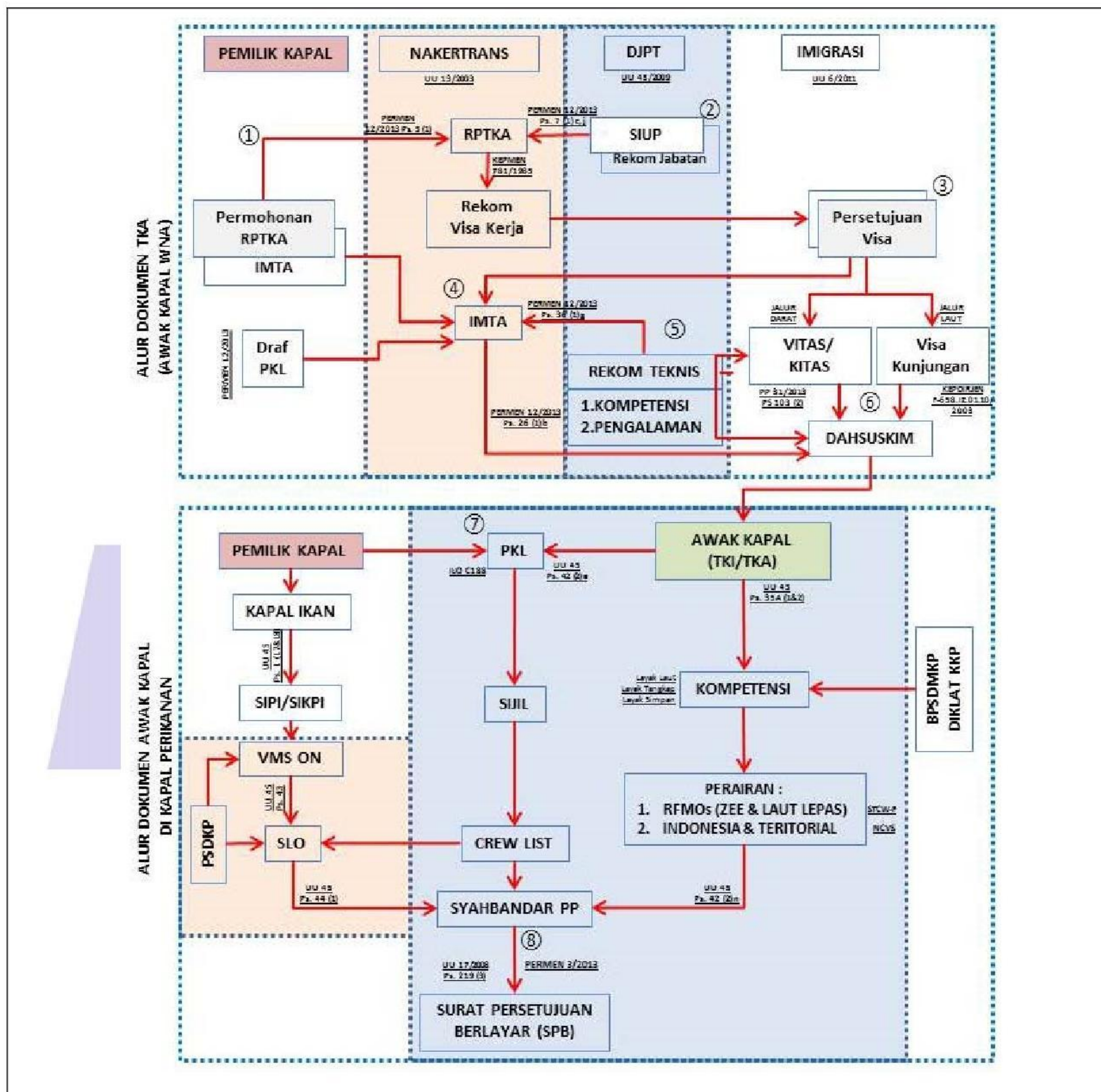
4.3.2 Ahli refrigerasi perikanan

Level keahlian refrigerasi perikanan didasarkan pada metode penggunaan mesin pendingin dan pembeku ikan, yaitu:

- a) mesin pendingin untuk metode penyimpanan ikan menggunakan air dingin
- b) mesin pembeku untuk metode penyimpanan ikan menggunakan ABF/IQF dan sarana *cold storage*.



**Lampiran
(informatif)
Mekanisme Penggunaan TKA di kapal perikanan bendera Indonesia**



KETERANGAN

1. NAKERTRANS : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. DJPT : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
3. IMIGRASI : Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Hukum dan HAM
4. SIUP : Surat Ijin Usaha Perikanan
5. REKOM JABATAN : DJPT memberi rekom jabatan mengacu Kepmenakertrans No. 781/1985 untuk mengurus RPTKA
6. RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
7. REKOM VISA KERJA : rekomendasi dari NAKER ke Imigrasi untuk mendapatkan visa kerja
8. IMTA : Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA US\$ 100/org/bln)

9. REKOM TEKNIS : DJPT memberikan rekom berdasarkan kompetensi dan pengalaman untuk pengurusan perpanjangan IMTA, VITAS, KITAS dan DAHSUSKIM
 10. VITAS : Visa Tinggal Terbatas (diberikan kepada orang yang bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia);
 11. KITAS : Kartu Ijin Tinggal Terbatas (nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. DAHSUSKIM : Kemudahan Khusus Keimigrasian (keputusan yang memberikan kemudahan ijin tinggal terbatas kepada tenaga ahli WNA yang bekerja sebagai nakhoda, awak kapal/alat apung yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, berupa kemudahan dibidang visa, izin keimigrasian, pendaftaran orang asing dan izin masuk kembali)
 13. PKL : Perjanjian Kerja Laut (perjanjian antara nelayan dengan pemilik kapal yang harus diketahui oleh otoritas setempat dimana hukum diberlakukan)
 14. SIJIL : Buku dokumen kapal berisi rekaman daftar awak kapal (nama, jabatan dan catatan) yang dibuat berdasarkan PKL dan disahkan oleh syahbandar
 15. CREW LIST : Daftar awak kapal setiap kapal meninggalkan pelabuhan untuk operasi
 16. VMS : Vessel Monitoring System (dinyatakan sah apabila telah diterbitkan SKAT → Surat Keterangan Aktivasi Transmitter)
 17. SLO : Surat Laik Operasi, diberikan setelah pemeriksaan keabsahan dokumen (perijinan dan awak kapal) dan kesesuaian fisik kapal ikan
- SPB : Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan atau syahbandar umum



Bibliografi

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2012 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tahun 2013 tentang Kesyahbandaran
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20/Men/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
- Convention International Labour Organization No. C188 Work in Fishing, 2007. Work in Fishing Convention and Recommendation, 2007 Action Plan 2011-2016 (ISBN : 978-92-2-124892-7)*
- Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1978 as amended in 1995*
- The Maritime Labour Convention, 2006 A Seafarers' Bill of Rights (ISBN : 1-904676-34-0)*
- Konvensi ILO Tentang Bekerja di Industri Perikanan, Tahun 2007 Panduan untuk Serikat Pekerja (ISBN : 1-904676-52-9)
- ITF Seafarers' Bulletin No. 27/2013